

PLURALISME HUKUM DAN PENGUASAAN TANAH DI DIY*

Oleh: Hendro Prabowo**

Abstract

On 24th of September 1960, the Government had enacted the law No. 5, 1960 about Basic Regulation of Agraria (UUPA). But, in Province of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), UUPA hasn't been able to apply yet completely. UUPA has been applied completely in DIY in 1984, when Keppres No. 33, 1984 about applying UUPA completely in DIY, was published. For that aim, Kepmendagri No. 66, 1984 about applying UUPA completely in DIY was published.

Since UUPA had been applied in DIY, we can say that a codification and unification of agraria law had been obtained in Indonesia. But, the fact shows that Kesultanan Yogyakarta and Puro Pakualaman have applied the rights of grounds, which are owned and occupied till the recent time. The fact shows the pluralisme of regulation, occupation and possession of grounds in DIY. Therefore, this research aims to know the rules, which regulates agraria in DIY Province, the grounds which include in the rules, and how are regulation, occupation and possession of grounds in DIY.

This is a normative, sociologic and historic yuridis research. Data in the research are collected by library and field research (by interview), then analyses the data qualitatively.

From the research, can be concluded that before enacting UUPA, agraria matters in DIY had been regulated by Rijkswet Kesultanan and Pakualaman. In it's development, agraria matters are regulated by a number of Perda, based on autonomy rights which are given by law No. 3, 1950 about DIY Formation. UUPA could be applied in DIY in 1984 through Keppres No. 33, 1984 jo. Kepmendagri No. 66, 1984 about applying UUPA completely in DIY.

From the research result, we know that the occupation and function of grounds of Kesultanan and Pakualaman are regulated by Rijkswet Kesultanan and Pakualaman. Then the grounds of Kesultanan and Pakualaman which are given, become the own rights of persons and villages since 1954 according to appointment in a number of Perda. While the grounds under UUPA and other rules of it's implementation are the grounds ex-Europe rights which had been convert as one of rights of grounds according to UUPA since 1960. This result shows a plurality in regulation, occupation and possession of grounds in DIY Province.

I. Pengantar

Daerah Istimewa Yogyakarta dulunya adalah suatu Kasultanan yang didirikan oleh Pangeran

Mangkubumi dengan ditandatangani Perjanjian Giyanti pada tahun 1775 antara Susuhunan Pakubuwono III dan VOC. Waktu itu yang menguasai Kerajaan Mataram adalah Pa-

* Diringkas dari Tesis S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UGM

** S.H..M.Hum., Alumni S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UGM

ngeran Mangkubumi. Perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan VOC selama 9 tahun, menjadikan Susuhunan Pakubuwono maupun VOC dipaksa untuk memberikan separuh Mataram kepada Pangeran Mangkubumi, lewat Perjanjian Giyanti tahun 1775, dalam perjanjian itu Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Sultan Hamengkubuwono I dengan keratonnya di Yogyakarta.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya swapradja, kerajaan jaman kolonial yang berhasil mempertahankan diri dalam negara Republik Indonesia, ini berarti Yogyakarta sebagai Kasultanan tetap memiliki wilayah, rakyat dan birokrasi pemerintahan yang keberadaannya dikukuhkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta oleh peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Wilayahnya merupakan gabungan wilayah Kasultanan dan Pakualaman ditambah daerah *enclave* Ngawen, Kota gede dan Imogiri.²

Pada saat Republik Indonesia didirikan sebagai negara, terdapat sekitar 250 *zelfbestuurendelandschappen* atau swapradja di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta dulunya adalah daerah swapradja yang mempunyai pemerintahan tersendiri sebelum Indonesia merdeka. Daerah-daerah swapradja banyak terdapat di Indonesia, namun hanya Daerah Istimewa Yogyakarta satu-satunya sampai saat sekarang ini yang berhasil mendapatkan kedudukan sebagai Daerah Istimewa menurut UUD 1945.³

Di daerah swapradja yang kebanyakan bercorak agraris, tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan, menurut tradisi, Raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam arti secara teoritis Rajalah yang berkuasa penuh atas tanah-tanah daerah kerajaan, sehingga hanya Raja yang berhak sepenuhnya atas tanah, se-

dangkan rakyat hanya sekedar memakainya saja. Jadi menurut sejarah, di daerah swapradja Yogyakarta dan Surakarta pada permulaannya tanah adalah milik Raja dan ia berkuasa penuh atas tanah-tanah. Rakyat hanya diberi wewenang "*hanggaduh*" atau meminjam tanah dan dikenakan kewajiban untuk memberikan sebagian hasil garapan kepada Raja.⁴

Pada masa pemerintahan kolonial belanda, Kasultanan Yogyakarta, selaku pemerintahan swapradja diakui sebagai satu kesatuan pemerintahan pribumi yang menguasai dan memiliki tanah dalam wilayah pemerintahannya. Setelah Indonesia merdeka, terdapat kurang lebih 250 daerah swapradja yang dihapuskan keberadaannya sebagai daerah swapradja, sehingga saat itu tidak ada pemerintahan swapradja atau daerah swapradja, yang ada hanya penyebutan bekas swapradja. Demikian pula tanah yang dikuasai pihak swapradja berubah menjadi tanah bekas swapradja.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dalam hal yang demikian menurut hukum Internasional pada prinsipnya berlakulah lembaran baru (*clean state*) bagi kehidupan hukum di Indonesia. Hal itu berarti bahwa semua daerah swapradja sebagai *zelfbestuurendelandschappen*, hapus dan tunduk pada keputusan hukum Bangsa Indonesia.⁵

Pada tanggal 23 september 1960, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dengan berlakunya UUPA dinyatakan bahwa tanah-tanah yang menjadi wewenang daerah swapradja atau bekas swapradja dengan sendirinya hapus dan dikuasai oleh negara.

¹ G.Moedjanto, 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Kanisius, Yogya. hlm 13

² P.J.Suwarno, 1994, *HB IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Kanisius, Yogya. hlm. 21

³ Soedarisman Poerwokoesomo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Gadjah Mada Press, Yogya. hlm. 3

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogya. hlm. 26

⁵ F.Soegeng Istanto, *Tanah Karaton Surakarta*. Mimbar Hukum No.41/VI/2002. FH-UGM, Yogya. hlm. 112

Tanah-tanah bekas swapradja banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia yang dahulunya adalah bekas daerah kerajaan, termasuk di Propinsi DIY. Hak atas tanah di Propinsi DIY sebelum berlaku sepenuhnya UUPA tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman serta terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU No.3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, urusan keagrariaan tetap menjadi kewenangan otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶

Menurut ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1960 maka segala penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah diatur oleh negara, termasuk tanah bekas swapradja. Status tanah itu telah berubah, yang dulunya mempunyai status tanah sebagai tanah kerajaan atau swapradja berubah menjadi tanah bekas swapradja dan hapus menjadi tanah negara.

Namun bagi Propinsi DIY, pada waktu itu UUPA belum dapat diberlakukan, hal tersebut dikarenakan sebelum UUPA dikeluarkan, di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terdapat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertanahan yang dikeluarkan berdasarkan UU No.3 Tahun 1950 jo UU No.19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa *riksblad-riksblad* dan peraturan-peraturan daerah.

UUPA Baru dapat diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1984, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya UUPA di DIY. Keppres No.33 Tahun 1984 menentukan bahwa pelaksanaan pemberlakuan UUPA secara penuh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kepentingan tersebut dikeluarkanlah

Kepmendagri No.66 Tahun 1984 tentang pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya UUPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷

Sejarah telah mencatat bahwa di DIY sebagai bekas wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman mempunyai kekhasannya sendiri di bidang pertanahan. Sampai dengan tahun 1984, ada 3 kelompok status tanah dengan sistem hukum yang mengaturnya berbeda satu dengan lainnya; *pertama*, tanah-tanah bekas hak barat yang dipunyai oleh orang-orang bekas Eropah dan Timur Asing pada tahun 1960 sudah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah menurut UUPA dan tunduk kepada ketentuan hukum agraria nasional; *kedua*, tanah-tanah milik (*domein*) Kasultanan dan Pakualaman yang sudah diberikan menjadi hak milik perorangan dan desa sejak tahun 1954 tunduk pada ketentuan dalam beberapa Peraturan Daerah; *ketiga*, tanah-tanah milik (*domein*) Kasultanan dan Pakualaman yang penguasaan dan penggunaannya diatur berdasarkan *riksblaad* Kasultanan dan Pakualaman.⁸

Namun pada kenyataannya, sampai pada saat sekarang ini, Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman masih mempunyai dan menjalankan kewenangan-kewenangan atas tanah tanah yang dipunyai dan dimilikinya. Tanah-tanah yang dimiliki dan masih di bawah kewenangan Kasultanan dan Puro Pakualaman tersebut tersebar di berbagai wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Permasalahan

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka Pluralisme dalam Pengaturan, Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Propinsi DIY tersebut cukup menarik untuk diteliti. Pe-

⁶ A.Im'an Sukri, Cahyadi JK, DKK, 2002. *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*, Parwi Foundation, Yogya, hlm. 47

⁷ Ni'matul Huda, *Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapradja di DIY*, Jurnal Hukum No.13 Vol 7, 2000. FH-Ull, Yogya, hlm. 112

⁸ Nurhasan Ismail, *Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal Dalam RUU Keistimewaan DIY*, Mimbar Hukum No.43/2, FH-UGM 2003, hlm. 67

nelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pertanahan yang berlaku di Propinsi DIY saat sekarang ini dan tanah-tanah yang tunduk pada masing-masing peraturan-peraturan pertanahan tersebut, serta bagaimana pengaturan, penguasaan dan kepemilikan tanah di Propinsi DIY.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perkembangan pengaturan pertanahan di Propinsi DIY.

Secara historis perkembangan hukum pertanahan di propinsi DIY dapat digambarkan sebagai berikut, sebelum berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, dan lebih jauh lagi sebelum terbentuknya kerajaan mataram, masyarakat jawa belum mengenal konsep hak milik perseorangan atas tanah. Tanah-tanah yang terletak di suatu wilayah, dikuasai oleh "desa" sebagai hak ulayat (*beschik-kingsrecht*). Adapun kepada warga desa diberikan beberapa hak antara lain hak pakai atau menggarap, hak wenang pilih atau mendahului, hak imbalan jabatan dan sebagainya. Kalaupun ada yang diberikan sebagai hak milik, tidak dapat dikatakan sebagai terkuat dan terpenuh, dikarenakan hak milik tersebut mengandung aspek kepentingan umum dalam arti bila tidak digarap lagi, maka hak itu akan dicabut dan diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Setelah munculnya institusi politik berbentuk kerajaan atau istana, terjadi pergeseran dalam sistem pemilikan tanah. Dalam peraturan yang diciptakan sendiri, raja mengklaim bahwa seluruh tanah diwilayahnya adalah milik mutlak raja, sebagian diantaranya diberikan kepada kerabat raja dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedangkan rakyat hanya memiliki hak anggaduh (meminjam) dan menggarap-

nya.⁹ Hal ini juga berlaku di daerah Kasultanan Yogyakarta, yang berdiri karena ada *paliha nagari* dengan perjanjian giyanti yang membagi dua kerajaan mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka daerah yogyakarta menjadi hak pribadi Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I). Pangeran Mangkubumi berhak atas seluruh Kasultanan Yogyakarta dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Karena Yogyakarta menjadi milik sultan pribadi, maka sultan memberikan hak tanah kepada orang-orang.¹⁰

Sejak tahun 1920-an saat dilaksanakannya reorganisasi agraria, raja mulai melepaskan hak-haknya atas sebagian besar tanahnya yang kemudian menjadi milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diberikan kepada penduduk desa berupa persil-persil tanah. Selanjutnya pada tahun 1946 pajak kepala dihapuskan, ditetapkannya pajak pendapatan sebagai ganti pajak tanah pada tahun 1951, dan diberikannya hak milik perseorangan turun temurun pada tahun 1954. Pada tahun 1954 ini, Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk, sehingga peraturan-peraturan yang berlaku di daerah ini tidak lagi dikeluarkan oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, melainkan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan pertama yang berhubungan dengan masalah pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY adalah Perda DIY No.5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan-ketentuan dalam Perda No.5 Tahun 1954 ini diatur lebih lanjut dengan Perda DIY No.10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe dari kalurahan dan hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; Perda No.11 Tahun 1954 tentang peralihan Hak Milik

⁹ Tri Widodo Wahyu Utomo. 2002. *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Navila. Yogyakarta. hlm. 122-123

¹⁰ Wawancara dengan KGPH Hadiwinoto. Pengageng KHP Wahono Sarto Kriyo, Sabtu 5 Juni 2004, di kantor Pracimasono Kraton Yogyakarta.

Perseorangan Turun Temurun atas tanah, dan Perda DIY No.12 tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan kepada pemerintah pusat agar UU No.5 Tahun 1960 segera diberlakukan secara penuh di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah melalui beberapa tahap pembahasan, akhirnya pada tanggal 9 Mei 1984 diundangkanlah Keputusan Presiden RI No.33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang No.5 Tahun 1960 di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres No.33 Tahun 1984 ini dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.66 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 di propinsi DIY.

B. Pluralisme pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah di Propinsi DIY.

Perda No.5 Tahun 1954 memberi ketentuan bahwa hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan peraturan daerah, sedang tentang hak atas tanah yang terletak didalam kota besar/kota praja yogyakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti yang termuat dalam *Rijksblad* Kasultanan tahun 1925 No.23 dan *Rijksblad* Pakualaman tahun 1925 No.25. Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Perda No.5 Tahun 1954 hanya mengatur hak atas tanah di kalurahan-kalurahan diluar kota praja yogyakarta. Sedangkan untuk dalam kota besar, sambil menunggu Perda yang baru, sementara masih berlaku *rijksblad-rijksblad* diatas. Tetapi ternyata sampai tahun 1984 saat pemberlakuan sepenuhnya UUPA di DIY, Pemerintah DIY tidak menghasilkan Peraturan Daerah yang baru, sehingga hak atas tanah di kota besar Yogyakarta masih diatur dengan peraturan-peraturan lama.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada waktu itu Daerah Istimewa Yogyakarta belum

memberlakukan peraturan tersebut, hak ini disebabkan karena selain di DIY telah ada peraturan tentang hukum pertanahan yang teratur, juga karena ketentuan pasal 4 ayat (4) UU No.3 Tahun 1950 yang memberi pengesahan dan legitimasi bagi DIY untuk melanjutkan urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk dengan undang-undang tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 1960 semestinya kewenangan untuk mengatur urusan agraria sebagai kewenangan otonom menjadi hapus, akan tetapi kenyataan menunjukkan masih terdapat ketentuan-ketentuan yang memberi kemungkinan berkembangnya wewenang otonomi dalam bidang agraria tersebut, yaitu ketentuan pasal 4 ayat (4) UU No.3 Tahun 1950, serta Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria yang khusus mengatur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belum diberlakukannya UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) di Yogyakarta mengakibatkan adanya pluralisme dalam hukum pertanahan di DIY, disatu pihak berlaku peraturan perundang-undangan daerah dan di pihak lain berlaku peraturan pemerintah pusat. Berlakunya UUPA sebagai produk perundangan pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terbatas pada tanah-tanah bekas hak barat. Dengan kata lain, UUPA sebenarnya telah berlaku di DIY, hanya belum sepenuhnya.

Keberagaman peraturan yang mengatur pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sedikit banyak akan menimbulkan suatu kondisi yang mengarah pada situasi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut terutama terlihat pada banyaknya tanda hak milik atas tanah yang berlaku di DIY. Diluar kota praja Yogyakarta tanda bukti hak miliknya dibuat menurut model D (Perda No.12 Tahun 1950), didalam kota sertifikat tanahnya adalah kutipan dari Jatno Pustoko Karaton Ngayogyakarta. Untuk tanah-tanah hak barat diberikan sertifikat menurut pasal 19 UUPA, yaitu yang berlambang

Garuda Pancasila. Sertifikat bentuk pertama dan kedua tidak bisa dijadikan sebagai jaminan di bank, sehingga pemiliknya menghendaki agar sertifikatnya diganti dengan sertifikat menurut UUPA. Alasan-alasan itulah yang melatarbelakangi pemikiran Gubernur DIY untuk menggariskan pembenahan kewenangan agraria sebagai kewenangan dekonsentrasi sesuai dan serupa dengan propinsi lainnya¹¹, sehingga pada tahun 1984, Sri Sultan HB IX secara pribadi memprakarsai dan berinisiatif untuk mengembalikan otonomi pertanahan yang dimiliki propinsi DIY kepada pemerintah pusat¹².

Setelah melalui beberapa langkah, akhirnya pada tanggal 9 Mei 1984 dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY, yang berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 menentukan bahwa pemberlakuan sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 di propinsi DIY diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Guna memenuhi ketentuan tersebut maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri No.66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 di Propinsi DIY.

C. Arah kebijakan dan perkembangan pengaturan tanah kraton di Propinsi DIY.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia perubahan terus berjalan dan dengan pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan UU No.3 Tahun 1950, masalah pertanahan merupakan otonom pemerintahan daerah. Salah satu isi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri termasuk menyangkut masalah keagriaan (pasal 4 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950).

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sepanjang menyangkut masalah pertanahan, maka oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkanlah: Perda No.5/1954 tentang Hak atas tanah di DIY, Perda No.10/1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Pemilikan Hak Andarbe dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah, Perda No.11/1954 tentang Peralihan Hak Milik Perorangan Turun Temurun Atas Tanah, Perda No.12/1954 tentang tanda yang sah Bagi Hak Milik Perorangan Turun Temurun Atas Tanah.

Sedangkan bagi tanah-tanah Kasultanan masih tetap diakui keberadaannya, hal tersebut tercantum dalam Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28/1956 alinea III: "Sebagian besar dari tanah diberikan kepada kalurahan dengan hak andarbe, sedangkan ada sebagian kecil dari tanah-tanah yang dikuasai oleh Kasultanan dan Pakualaman sendiri yaitu S.G dan P.A.G". Tanah kasultanan keberadaannya diperkuat dan dipertegas sebagai hak milik, bahkan tidak dipermasalahkan pengertian tentang tanah itu milik Sultan (Sultan Ground) ataukah milik Pemerintahan Kasultanan (Sultanaat Ground), pengertiannya hanya satu yaitu tanah Kagungan Dalem, hal itu tersirat didalam surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K1/1.5/849/80 Tanggal 24 Maret Tahun 1980 perihal permohonan status tanah S.G oleh Pengageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Karaton Yogyakarta.¹³

Keberadaan tanah-tanah Kasultanan dan Pura Pakualaman dengan sistem hukum pengaturnya sendiri harus diakui dan diperhatikan. Pengakuan tersebut bukan hanya karena norma-norma dalam *Rijksblad* dan kelembagaan pen-

¹¹ Tri Widodo Wahyu Utomo, *Hukum Pertanahan....* Opcit, hlm.91

¹² Wawancara dengan KGPB Hadiwinoto, Pengageng KHP Wahono Sarto Kriyo, Sabtu 5 juni 2004, Kantor Pracimasono Kraton Yogyakarta

¹³ KHP Wahono Sarto Kriyo Nomor 10/ WAK/ 80

dukungnya seperti Panitikismo masih ada dan fungsional, namun juga karena Keppres No.33/1984 jo. Kepmendagri No.66/1984 tidak menuntut pemberlakuan UUPA sepenuhnya secara otomatis terhadap semua kelompok tanah tersebut diatas. Dalam kepmendagri tersebut dinyatakan: "karena masih terdapat hal-hal yang memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut agar pelaksanaan pemberlakuan tersebut berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pemberlakuan itu dilaksanakan secara bertahap". Diantara hal-hal yang masih perlu dikaji dan diteliti itu tentunya tanah-tanah kasultanan dan pakualaman karena tidak sekadar menyangkut hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah dengan pihak kasultanan dan pura pakualaman yang tentunya berlandaskan pada ikatan emosional, namun hal tersebut juga terkait dengan aspek politis. Bagaimanapun juga posisi Sultan dan Paku Alam secara politis di lingkungan kelompok-kelompok tertentu di DIY masih mempunyai pengaruh, disamping tentunya peranan kedua bekas kerajaan ini secara historis terhadap Republik Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja.¹⁴

Hubungan antara Kasultanan dan Pakualaman sebagai pihak yang mempunyai kewenangan atas tanah-tanahnya dengan warga masyarakat yang menggunakan sebagian dari tanah-tanah tersebut berlangsung secara tertib berdasarkan hubungan hukum yang jelas seperti mager-sari atau persewaan atau bentuk hubungan kerjasama lainnya. Dengan kata lain, sampai saat sekarang Kasultanan dan Pakualaman tetap menjalankan peranannya sebagai pihak yang berwenang atas tanah-tanahnya sehingga hubungan hukum antara Kasultanan dan Pakualaman dengan tanah-tanahnya tetap berlangsung dan tidak pernah terputus yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan hukum tersebut.

Mengenai perkembangan terakhir pada saat sekarang ini dari pengaturan terhadap tanah-

tanah kraton yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan adanya rapat membahas inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah kraton di DIY. Rapat tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2000, bertempat digedung Praciwasono Kepatihan Yogyakarta yang dihadiri oleh Assisten Ketataprajaan sebagai pimpinan rapat, Pengageng Panitikismo Kraton Yogyakarta, KGPA Paku Alam IX, Kanwil BPN Propinsi DIY, KaBiro Tapem Propinsi DIY, Kabiرو Hukum Propinsi DIY, Kabiرو Perlengkapan Propinsi DIY, Kabag Tapem se Propinsi DIY, Kabag Pemdes se Propinsi DIY dan BPN se Propinsi DIY.

Rapat koordinasi diadakan untuk menyamakan persepsi mengenai apa yang disebut tanah-tanah kraton atau SG, dan tanah-tanah Puro Pakualaman. Hal tersebut dalam rangka menerima kunjungan TIM BPN Pusat yang akan mengadakan Kunjungan kerja ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun misi dari BPN Pusat adalah untuk mencari masukan-masukan untuk bahan penyelesaian masalah tanah Kraton dan Pakualaman yang dipandang masih ruwet, serta menjajaki untuk menyamakan persepsi apa dan meliputi apa saja tanah Kraton dan Puro Pakualaman dan apa keinginan Pemda Propinsi DIY.

Kesimpulan rapat membahas inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Kraton Yogyakarta tersebut ada 3 poin, yaitu:¹⁵

1. Bahwa rencana kunjungan TIM BPN Pusat adalah dalam rangka menyamakan persepsi tentang tanah-tanah kraton (SG).
2. Menyepakati persepsi bersama Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Pemda Propinsi DIY bahwa yang disebut tanah kraton (SG) dan tanah Puro Pakualaman adalah semua tanah yang menjadi wilayah kraton dan Puro Pakualaman minus tanah-tanah yang sudah diberikan hak pemilikan kepada siapapun.

¹⁴ Nurhasan Ismail, Menempatkan Realitas..., Opcit. hlm. 67-68.

¹⁵ Laporan Harian Sekda Kab.Bantul Bag.Tata Pemerintahan Nomor 156/ Tapem, tanggal 12 April 2000

3. Dari persepsi tersebut diharapkan sama dengan persepsi Pusat, sehingga penyelesaian dapat disepakati bersama dan sekaligus untuk melakukan penertiban administrasi pertanahan di Yogyakarta menyangkut kepastian hak, hukum dan kewajiban. Hal tersebut perlu kerjasama antara Pemda Propinsi DIY, BPN Propinsi/Kabupaten dengan Kraton dan Pakualaman.

Pihak Kraton Ngayogyakarta juga berinisiatif untuk melakukan penertiban tanah-tanah kraton. Pihak kraton yang dalam hal ini adalah KHP Wahono Sarto Kriyo mengajukan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DIY yang mana pada intinya menerangkan bahwa kraton bersama Pemerintah Propinsi DIY dan Kanwil BPN Propinsi DIY sedang melaksanakan penertiban tanah-tanah kraton di DIY, berkaitan dengan hal tersebut maka pihak Kraton Yogyakarta meminta agar permohonan peningkatan status tanah menjadi hak milik sepanjang menyangkut tanah kraton supaya ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut. Tembusan surat ini ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Gubernur dan Walikota/ Bupati se-Propinsi DIY, dan Kepala Kantor Pertanahan diseluruh Propinsi DIY, serta Kantor Panitikismo Kraton Yogyakarta.¹⁶

Berdasarkan hasil rapat membahas inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Kraton Yogyakarta tersebut dan berdasarkan surat KHP Wahono Sarto Kriyo Kraton Yogyakarta, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 agustus 2003 mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, yang pada intinya memohon petunjuk mengenai tanah-tanah kraton yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷

Kemudian menindaklanjuti surat yang dikirim oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi DIY tersebut diatas, maka Kepala BPN Pusat memberikan/menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi DIY, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota di Propinsi DIY, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman, yang isinya adalah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah status hukum hak atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat/ Puro Pakualaman, terletak di wilayah Propinsi DIY.
2. Bahwa terhadap permasalahan dimaksud, sebelum berlakunya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta (1984) telah dilaksanakan pengadministrasian berupa tanda bukti hak atas tanah oleh Direktorat Agraria Propinsi DIY atas pemakaian/penggunaan oleh pihak ketiga terhadap tanah Kasultanan/Puro Pakualaman dan hal tersebut tidak menimbulkan masalah sampai dengan saat ini.
3. Bahwa terhadap permohonan hak atas tanah Kasultanan dan Puro Pakualaman oleh pihak ketiga, sambil menunggu tentang status tanah Kasultanan/Puro Pakualaman Yogyakarta oleh Presiden, hendaknya diambil sikap sebagai berikut:
 - a. Membentuk team peneliti terhadap permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak ketiga yang terdiri dari Kantor Pertanahan setempat dan Kasultanan/ Puro Pakualaman, apabila benar tanah yang dimohon adalah tanah Kasultanan/ Puro Pakualaman, pemohon perlu melampirkan surat pernyataan yang berisi bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Kasultanan/ Pakualaman dan bersedia mentaati ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Surat KHP Wahono Sarto Kriyo Kraton Yogyakarta Nomor 138/ WSK/ 2000, Tanggal 22 September 2000

¹⁷ Surat Kepala Kanwil BPN Prop.DIY Nomor 6301/ 1125/ VIII/ BPN/ 2003, Tanggal 19 Agustus 2003

¹⁸ Surat Kepala BPN Pusat Nomor 570.34-2493, Tanggal 21 Oktober 2003

- b. Dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanahnya, dicatat bahwa tanah tersebut diterbitkan diatas tanah Kasultanan/ Puro Pakualaman.
4. Eksistensi Tanah Kasultanan dan Puro Pakualaman di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU No.3 Tahun 1950, yang mana pemerintah RI memberikan kewenangan urusan rumah tangga sendiri dalam bidang agraria/ pertanahan, maka dikeluarkanlah Perda No.5/1954 yang antara lain berbunyi: "melangsungkan pemberian hak andarbe kepada warga masyarakat kotapraja Yogyakarta dan meningkatkan hak anganggo turun temurun dari warga masyarakat pedesaan menjadi hak milik perorangan turun temurun, serta hak andarbe kalurahan yang disebut sebagai tanah desa".

Dengan diberlakukannya UUPA yang bersifat nasional, berdasarkan diktum 4A menyatakan bahwa, bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara, hanya saja dalam diktum lanjutan 4 B menyatakan bahwa pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya saja, hingga saat sekarang ini peraturan pemerintah yang dimaksudkan tersebut belum pernah ada.

Dengan diberlakukannya UUPA di DIY berdasarkan Keppres No.33/ 1984 yang juga ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No.69/ 1984, yang dimaksud dengan tanah hak adat sebagai dimaksud dalam pasal II ketentuan konversi UUPA, dan selanjutnya dapat dikonversi menurut PMPA No.22/ 1962 adalah hak-hak tanah adat di DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY No.5 Tahun 1954.

Dengan demikian maka terhadap tanah-tanah hak milik Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang selama ini belum pernah dilepaskan, masih menjadi hak milik atau merupakan domein bebas dari Ka-

sultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang hingga kini belum terjangkau oleh ketentuan UUPA. Hal ini juga diperkuat lagi dengan telah ditetapkannya keberadaan Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang diakui sebagai cagar budaya yang didasarkan atas histories, sosiologis dan yuridis yang harus dijaga dan dipelihara keberadaan dan pendukungnya.

Tanah-tanah Kasultanan maupun tanah-tanah Pakualaman di Propinsi DIY baik sebelum maupun sesudah berlakunya UUPA berbeda dengan daerah bekas swapraja lainnya. Data menunjukkan hampir disetiap desa atau Kalurahan di DIY terdapat tanah-tanah kraton. Tanah-tanah Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman hingga sat ini masih diakui eksistensi dan keberadaannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal-hal yang menjadi acuan dan dasar dari eksistensi tanah-tanah kraton di Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

1. *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta No.16/ 1918 (dan *Rijksblad* Pakualaman No.18/ 1918) yang isinya antara lain: "*Ingsun angle-starekake watonne, sakabehe bumi kang ora ono tondho yektine kadarbe ing liyo mowo wewenang eigendom dadi bumi kangungane Karaton Ingsun Ngayogyakarta*" terjemahannya: "saya akan melestarikan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (eigendommenya) menjadi tanah milik Keraton Yogyakarta".
2. Undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah DIY untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menyangkut urusan keagrariaan (pasal 4 ayat (4)). Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut sepanjang menyangkut masalah pertanahan, maka oleh Pemda Propinsi DIY dikeluarkanlah Perda No.5, 10, 11 dan 12 Tahun 1954.
3. Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 1956 alinea III menyatakan: "sebagian besar dari tanah diberikan kepada kalurahan dengan hak

andarbe, diberikan kepada rakyat dengan hak anganggo turun temurun. Sedangkan ada sebagian kecil dari tanah-tanah yang dikuasai oleh Kasultanan dan Pakualaman sendiri yaitu tanah SG dan PAG". Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah Kasultanan dan Puro Pakualaman masih tetap dipertahankan.

4. Surat Gubernur DIY Nomor K1/ 1.5/ 849/ 80 tanggal 24 Maret 1980 perihal permohonan Status Tanah SG oleh Pengageng KHP Wahono Sarto Kriyo Kraton Yogyakarta bahwa tanah Kraton Yogyakarta masih tetap diakui keberadaannya. Bahkan tidak dipermasalahkan pengertiannya apakah tanah itu milik Sultan (*Sultan Ground*) ataupun milik Pemerintahan Kasultanan (*Sultanaat Ground*), pengertiannya hanya satu yaitu tanah Kaugungan Dalam.
5. Makalah tentang Pelaksanaan UUPA di Propinsi DIY oleh Kepala Direktorat Agraria, setahun setelah diberlakukannya UUPA di DIY pada tanggal 14 september 1985. Makalah tersebut mengatakan berdasarkan UU Nomor 5/1960 diktum keempat (A) menentukan bahwa tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja hapus dan beralih kepada Negara. kemudian pada diktum keempat (B) disebutkan bahwa hal yang bersangkutan dengan ketentuan diatas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang peraturan Pemerintah yang dimaksud belum pernah diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya UUPA di Propinsi DIY tanah-tanah Kasultanan dan Pakualaman tidak hapus dan beralih menjadi tanah Negara.
6. Dalam pemanfaatan tanah khususnya yang meggunakan tanah keraton, koordinasi dilakukan antara Bappeda, Dinas Tata Kota. Bagian Perekonomian Setwilda Kotamadya Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kota-

madya Yogyakarta dengan Kraton Yogyakarta. Dalam penerbitan ijin lokasi, berdasarkan Perda Kotamadya Yogyakarta No.5/ 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya, ditentukan bahwa setiap rencana peruntukan lahan di wilayah Kotamadya Yogyakarta harus sesuai dengan Perda ini dan mendapat ijin dari Kepala Daerah. Rencana peruntukan lahan tersebut harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 39 ayat 1 dan 2). Ketentuan tersebut kemudian ditafsirkan apabila lokasi yang dimohonkan ijin itu berada diatas tanah Kraton, Bappeda Kotamadya Yogyakarta akan menerbitkan ijin lokasi bagi si pemohon apabila telah disertai rekomendasi dari KHP Wahono Sarto Kriyo, dalam hal ini oleh Panitikismo Kraton Yogyakarta.¹⁹

7. Dalam hal penerbitan ijin membangun bangunan-bangunan, menurut penjelasan Pasal 12 Perda Kotamadya Yogyakarta No.5/1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan, bahwa permohonan IMBB yang diantaranya harus melampirkan salinan surat bukti hak atas tanah/sertifikat tanah dan surat persetujuan pemilik tanah/bangun-bangunan apabila tanah/bangun bangunan bukan milik sendiri. Ketentuan dalam pasal 12 ini kemudian ditafsirkan secara luas, termasuk didalamnya apabila status tanah itu milik Keraton Yogyakarta atau di kawasan Keraton, maka harus ada ijin dari pihak Keraton yaitu ijin/ rekomendasi dari Pengageng KHP Wahono Sarto Kriyo, dalam hal ini oleh kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta. Jadi, Dinas Tata Kota akan menerbitkan ijin mendirikan bangun-bangunan jika si pemohon telah melampirkan rekomendasi dari pihak Keraton Yogyakarta.²⁰

¹⁹ Nimatul Huda. 1997. *Penyelenggaraan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keraton Yogyakarta dalam Pengaturan Pertanahan*. Tesis. Pasca Sarjana Universitas Padjajaran. Bandung. Hal 98

²⁰ *Ibid*. Hal 98-99

8. Demikian halnya apabila seseorang atau badan hukum akan mengajukan permohonan ijin tempat usaha (HO), berdasarkan Perda Kotamadya Yogyakarta No.9/ 1977 tentang ijin tempat usaha *juncto* SK Walikotamadya Yogyakarta Nomor 137/ KD/ 1988 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Tempat Usaha, si pemohon dipersyaratkan melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/rekomendasi dari pemilik tanah/ bangunan bagi perusahaan yang menyewa/ mengontrak tanah/ bangunan tersebut (pasal 3 Perda No.9/ 1977 jo Pasal 2 e SK Walikotamadya Yogyakarta No.137/KD/1988). Jadi, Bagian Perekonomian Setwilda Kotamadya Yogyakarta akan menerbitkan ijin tempat usaha (HO) jika permohonan telah dilampiri rekomendasi dari KHP Wahono Sarto Kriyo Keraton Yogyakarta.²¹
9. Rapat membahas inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah kraton di DIY yang diadakan pada hari Selasa 11 april 2000 di kepatihan yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan instansi terkait diseluruh Propinsi DIY, yang mana dalam rapat tersebut dicapai suatu kesepakatan mengenai adanya persepsi bersama antara Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Pemda Propinsi DIY bahwa yang disebut tanah SG dan PAG adalah semua tanah-tanah yang menjadi wilayah Keraton Kasultanan dan Puro Pakualaman minus tanah-tanah yang sudah diberikan hak pemilikan kepada siapapun.
10. Surat Kepala BPN Pusat Nomor 570.34-2493 tanggal 21 oktober 2003, yang dikirimkan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi DIY yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap permohonan hak atas tanah Kasultanan dan Puro Pakualaman oleh pihak ketiga, apabila tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman, maka pemohon perlu melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut adalah tanah Kasultanan

atau tanah Pakualaman. Kemudian dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanahnya, dicatat bahwa tanah tersebut diterbitkan diatas tanah Kasultanan/ Pakualaman.

11. Meskipun Pemerintah Keraton Yogyakarta sudah berintegrasi dengan Pemerintah RI tahun 1945, namun pada kenyataannya sampai saat ini pengaruh dan wibawa Keraton masih sangat terasa dimasyarakat, di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah dan swasta. Pengakuan terhadap eksistensi tanah-tanah Keraton yang ada di DIY masih dipegang teguh oleh masyarakat yogyakarta yang sampai sekarang ini masih mengakui bahwa tanah keraton yang mereka tempati adalah tanah Kagungan Dalem. Ketaatan masyarakat dan mereka yang menggunakan fasilitas tanah/bangunan Keraton dapat dilihat dari secara rutin mereka membayar Uang penanggalan (uang sewa) atas fasilitas yang telah diberikan Keraton tersebut.

IV. Penutup

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jauh sebelum UUPA lahir, di DIY masalah pertanahan telah diatur dalam rijksblad Kesultanan dan Pakualaman. Kemudian dalam perkembangannya, masalah pertanahan diatur dalam beberapa Perda atas dasar kewenangan otonom yang diberikan oleh UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. UUPA baru dapat diberlakukan si DIY tahun 1984 melalui Keppres No. 33 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanah-tanah milik (domein) Kesultanan dan Pakualaman penguasaan dan penggunaannya diatur berdasarkan Rijksblad Kesultanan dan Pakualaman yang sudah diberikan menjadi hal milik (domein) Kesultanan dan Pakualaman yang sudah diberikan menjadi hak milik perorangan dan desa sejak tahun 1954 tunduk kepada ketentuan dalam beberapa Perda, sedangkan

²¹ Ibid, Hal 99-100

tanah-tanah yang tunduk kepada UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah tanah-tanah bekas hak barat yang tahun 1960 sudah di-konversi menjadi salah satu hak atas tanah

menurut UUPA. Hal ini memperlihatkan adanya realitas mengenai Pluralisme dalam pengaturan, penguasaan dan kepemilikan tanah di Propinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Huda Ni'matul, 1997, *Penyelenggaraan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Keraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Pertanahan*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Huda Ni'matul, Beberapa Kendala Dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapradja di DIY, Dalam *Jurnal Hukum* No. 13 Vol 7/ 2000, FH UII Yogyakarta.
- Ismail Nurhasan, Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal Dalam RUU Keistimewaan DIY, dalam *Mimbar Hukum* No. 43/11/2003, FH-UGM, Yogyakarta.
- Istanto Soegeng, Tanah Karaton Surakarta, dalam *Mimbar Hukum* No. 41/VI/2002 FH-UGM, Yogyakarta.
- Laporan Harian, Sekda Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan No. 156/Tapem.
- Mertokoesoemo Soedikno, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moedjanto. G, 1994, *Kasultanan Yogyakarta Dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta.
- Poerwo Koesoemo Soedarisman, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Sukri Im'an A, Cahyadi JK (dkk), 2002, *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*, Parwi Foundation, Yogyakarta.
- Suwarno. PJ, 1994, *HB IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tri Widodo Wahyu Utomo, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

Surat Kabar

- Surat KHP Wahono Sarto Kriyo, Kraton Yogyakarta, Nomor 138/ WSK/ 2000
- Surat KHP Wahono Sarto Kriyo Nomor 10/ WAK/ 80
- Surat Kepala Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor 630/ 1125/ VIII/ BPN/ 2003
- Surat Kepala BPN Pusat Nomor 570.34-2493/ 2003